

## SINOPSIS

Pemberian dana desa dengan jumlah yang tidak sedikit untuk melaksanakan pembangunan desa menjadi tantangan bagi pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa agar penyerapan anggaran berjalan secara optimal. Dalam pelaksanaannya, pemanfaatan dana desa banyak diselewengkan oleh pemerintah desa karena kurangnya pengawasan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Keterbukaan informasi publik dalam pengelolaan anggaran menjadi kunci utama dimana pemerintah desa dituntut untuk melaksanakan hal tersebut sesuai dengan prinsip akuntabilitas pengelolaan keuangan. Oleh karena itu, diperlukan sebuah platform terbuka yang mampu meningkatkan keterlibatan partisipasi dan pengawasan masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa. Dalam mengatasi permasalahan tersebut Pemerintah Kabupaten Wonosobo mengembangkan sistem informasi keuangan desa melalui program Open Data Keuangan Desa yang berfungsi bagi masyarakat dalam mengakses dokumen-dokumen perencanaan pembangunan desa maupun pengelolaan keuangan desa.

Dalam mengetahui implementasi program Open Data Keuangan Desa untuk peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Wonosobo pada tahun 2017 penelitian studi kasus ini menggunakan metode kualitatif dengan mengumpulkan data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara dan dokumentasi yang kemudian dianalisis menggunakan teknik analisa kualitatif dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

Hasil analisis data dari penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa implementasi program Open Data Keuangan Desa mampu meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, dimana melalui program tersebut terdapat peningkatan partisipasi dan kepedulian masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan desa di Kabupaten Wonosobo. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya (1) kegiatan transparansi diwujudkan melalui akses secara online pada situs [datadesa.wonosobokab.go.id](http://datadesa.wonosobokab.go.id) dan open data manual atau baliho APB Desa sebagai wujud transparansi, (2) kehadiran regulasi dan penerapan sistem program yang rinci memungkinkan bagi masyarakat tanpa pandang bulu dapat berpartisipasi mengawasi kegiatan pengelolaan keuangan desa seperti 8 aduan masyarakat mengenai dana transfer desa, (3) tertib dan disiplin anggaran ditunjukkan dengan adanya sistem koordinasi yang jelas dalam kegiatan audit pelaporan keuangan desa melalui sistem *back end* dan *front end* pada program Open Data Keuangan Desa yang memudahkan proses evaluasi dan verifikasi anggaran. Meskipun demikian implementasi program tersebut mengalami kendala sumber daya manusia karena latar belakang rendahnya tingkat pendidikan pada masyarakat Wonosobo sehingga menghambat partisipasi masyarakat. Saran yang dapat diberikan adalah meningkatkan kegiatan sosialisasi dengan melakukan segmentasi sasaran yang akan menerima informasi program agar dapat diterima oleh masyarakat dengan tepat.

**Kata Kunci:** Akuntabilitas, Dana Desa, Open Data Keuangan Desa.